

Internet untuk pedesaan dan pemanfaatannya bagi masyarakat

The usage of internet for the village and villagers

Henri Subiakto

Departemen Ilmu Komunikasi, FISIP, Universitas Airlangga

Jalan Airlangga 4-6 Surabaya 60286, Indonesia

E-mail: dr.henrisubiakto@gmail.com

Abstract

The development of telecommunication and information infrastructures in the remote area as part of Universal Service Obligation program has enabled its inhabitant to have equal opportunity to participate in the global communication. This study focused on how rural people used information and communication technology. Quantitative and qualitative methods were selected to describe the internet usage in the remote areas in East Java. Quantitative research method was used to describe variables in numerical data while qualitative research method was used to give narrative description. The result showed that there was a digital divide among the users of information and communication technology, with male users being more dominant than female. Besides, internet, innovation program was mostly used by students and young people. The introduction of internet in the rural areas had given the people access to the information and communication and had become a means of learning the internet. The utilization of communication and information facilities, however, had not been optimized.

Keywords: *digital divide, Universal Service Obligation, information communication technology*

Abstrak

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi dan informatika di daerah pelosok sebagai bagian dari program *Universal Service Obligation*, telah membuka isolasi masyarakat desa menjadi memiliki kesempatan yang sama untuk berkomunikasi secara global. Studi ini memfokuskan pada bagaimana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) itu digunakan oleh masyarakat pedesaan. Metode kuantitatif dan kualitatif digunakan untuk menggambarkan fenomena penggunaan internet di pelosok pedesaan Jawa Timur. Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi, dengan mengambil 2 kecamatan di masing-masing Kabupaten, sebagai daerah percontohan program desa-desa terpencil di Jawa Timur. Ada 3 (tiga) jenis instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu (i) daftar pertanyaan (kuesioner); (ii) pedoman wawancara mendalam, dan (iii) dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari data desa maupun dari pemerintah. Selanjutnya masing-masing responden diwawancara dengan kuesioner terstruktur dan wawancara mendalam. Analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik (SPSS), untuk data kualitatif digunakan analisis deskripsi naratif. Hasil penelitian ini menunjukkan terjadinya *digital divide* pada masyarakat pengguna TIK. Laki-laki lebih mendominasi dibandingkan dengan pengguna perempuan. Selain itu, usia pengguna internet dan inovasi program juga lebih banyak digunakan anak usia sekolah dan kalangan muda. Program internet masuk desa telah membuka akses informasi dan komunikasi masyarakat dan menjadi sarana belajar mengenal internet. Namun, pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas komunikasi dan informatika ini belum maksimal.

Kata kunci: *digital divide, Universal Service Obligation, teknologi informasi dan komunikasi*

Pendahuluan

Sejak awal 2010 Pemerintah Indonesia telah meresmikan 3 (tiga) proyek besar di sektor telekomunikasi dan informatika yaitu pembangunan Palapa Ring 1, pengoperasian program Desa Dering dan sejumlah proyek infrastruktur telekomunikasi. Dengan program tersebut, 31.824 desa pada akhir tahun 2011 dapat terakses telekomunikasi. Tahun-tahun selanjutnya pun tentu akan semakin banyak desa-desa yang terlayani telekomunikasi. Selain kedua program unggulan Pemerintah Indonesia juga membangun sejumlah infrastruktur telekomunikasi, di antaranya *backbone fiber optic* Sulawesi–Kalimantan, *backbone fiber optic* Sumatera, jaringan transport IP, *backbone fiber optic Batam Singapore Cable System* dan pembangunan jaringan *Asia-America gateway* dengan kapasitas 40 Gbps.

Pemerintah berkomitmen mewujudkan azas adil dan merata dalam pelayanan Telekomunikasi melalui Penyediaan Desa Dering/Pintar; Penyediaan Pusat Layanan Internet Kecamatan; Mewujudkan Program Internet Sehat dan Aman; Penyediaan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan; Penyediaan Internet Exchange. Program Penyelenggaraan Jasa Internet (PJI) atau lazim disebut Desa Pintar merupakan rangkaian dari *Program Universal Service Obligation (USO)*. Program ini dimaksudkan sebagai sarana memperkenalkan bidang *information and communication technology (ICT)* pada masyarakat, terutama untuk meningkatkan produktivitas dan perekonomian di daerah.

Skenario global tentang pembangunan teknologi komunikasi dan informasi juga merumuskan perkembangan ekonomi dan perubahan sosial di negara-negara dunia semakin bertambah dengan kemajuan komputer dan teknologi ICT pada abad 21 ini (Selwyn 2004). Bahkan beberapa ahli mengemukakan argumen bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi telah memberikan dampak terhadap perubahan yang disebut oleh Castell sebagai '*knowledge economy*' dan '*network societies*' (Castell 1996, 1997, 1998, Reich 1991)

Kemampuan penggunaan teknologi komunikasi dan informatika dianggap penting bagi era "modernisasi". Konsepsi "modernisasi" sendiri diukur dengan kemajuan pembangunan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga pembangunan teknologi komunikasi dalam proses industrialisasi diarahkan untuk kemajuan warga negaranya. Pemerintah berkeinginan membawa warga negaranya agar tidak tertinggal atau "*left behind*" dan bisa memenangkan atau "*winning*" era globalisasi yang terjadi (Selwyn 2004).

Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) bagi masyarakat memang dianggap akan memberikan perubahan-perubahan mendasar, terutama peningkatan kualitas kehidupan. Kedatangan TIK dapat dianggap sebagai "*individual empowering*" atau pemberdayaan bagi individual (D'Allesandro & Dosa 2001). Pembangunan TIK juga meningkatkan level interaksi sosial dan keterlibatan masyarakat sipil (Katz et al. 2001). Keinginan mewujudkan masyarakat modern yang tidak tertinggal dengan kondisi globalisasi, mendorong pemerintah untuk berupaya memajukan kualitas kehidupan warga negaranya melalui program-program pembangunan teknologi informasi hingga ke pelosok desa. Tujuannya adalah selain memberikan akses murah terhadap TIK juga mengenalkan penggunaan TIK untuk perubahan kehidupan dan pertumbuhan ekonomi di daerah pelosok pedesaan. Namun adakalanya terjadi '*digital divide*', yaitu keberadaan teknologi komputer, jaringan internet, dan pelayanan telepon yang baik, cepat dan murah tidak bisa diakses secara merata oleh semua lapisan masyarakat. Mereka yang berada di perkotaan saja yang memiliki kondisi infrastruktur internet dan layanan telepon yang lebih baik sedangkan masyarakat di daerah pedesaan belum bisa mendapatkan komputer yang bagus, jaringan internet cepat dan layanan telepon yang baik.

Hasil penelitian Unair, ITB dan ITS (2011) di 4 Propinsi di Jawa juga menunjukkan bahwa ada peningkatan fasilitas TIK yang dimiliki oleh masyarakat. Misalnya, pada tahun 2009 6.2% penduduk yang memiliki komputer, kemudian meningkat menjadi 6.7% (2010), dan pada tahun 2011 meningkat menjadi 8%. Selain peningkatan jumlah kepemilikan, juga terjadi keragaman pemanfaatannya. Misalnya, handphone ini tidak hanya dipergunakan untuk akses telepon (*voice*), SMS, dan MMS melainkan fasilitas lain yang digunakan yakni internet. Peningkatan akses komunikasi akan semakin meningkat saat Program Penyelenggaraan Jasa Internet (PJI) atau program Desa Pintar digulirkan.

Penelitian yang dilakukan oleh 3 perguruan tinggi tersebut juga menemukan bahwa keberadaan telekomunikasi pada masyarakat pedesaan sangat diperlukan, bukan hanya untuk memfasilitasi dan melayani perkembangan ekonomi di masyarakat, tetapi juga untuk memperbaiki infrastruktur masyarakat pedesaan. Hal yang menarik adalah setidaknya sebanyak 84,4% masyarakat sangat mendukung apabila dikembangkannya desa berdering menjadi desa Pintar (desa yang mempunyai akses internet). Sebab masyarakat umumnya meyakini bahwa kemudahan akses informasi melalui internet akan mampu memajukan perkembangan desa, khususnya pendidikan anak-anak, pengetahuan masyarakat dan kemampuan usaha ekonomi masyarakat.

Rangkaian kegiatan peluncuran Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan (MPLIK) telah dilakukan di beberapa propinsi di Indonesia. Selain itu Pemerintah Indonesia juga berkomitmen mewujudkan “*Indonesia Connected*” (Indonesia Tersambung), yakni membangun kabel optik (serat optik) dari Manado ke Ternate, selanjutnya Ternate ke Papua. Rencana tersebut akan dilaksanakan pada tahun 2012-2013. Studi yang dilakukan ini merupakan evaluasi dampak pembangunan program internet murah dan desa berdering yang sudah dilakukan pemerintah pada tahun 2012 di daerah-daerah pelosok pulau Jawa, khususnya dalam penelitian ini adalah Jawa Timur. Beberapa daerah yang menjadi sampel penelitian merepresentasikan gambaran tentang bagaimana program internet murah untuk rakyat di pedesaan. Berdasarkan latar belakang tadi, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah: (1) Siapa pengguna aktual dan potensial Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan MPLIK di pedesaan di Jawa Timur? (2) Bagaimanakah akses dan perilaku komunikasi pengguna program ini? (3) Bagaimanakah kemanfaatan inovasi PLIK dan MPLIK selama ini? (4) Apa bentuk-bentuk layanan PLIK dan MPLIK yang digunakan masyarakat?

Selwyn (2004) menjelaskan tentang konsep *digital divide*, yang banyak dibahas sebagai isu-isu paska adopsi atau ‘*post-adoption*’ issues, seperti level akses individu terhadap teknologi, dan keterlibatan aktual terhadap dan penggunaan teknologi, dan utamanya, hasil jangka pendek dan konsekuensi-konsekuensi jangka panjang dari penggunaan teknologi. Selwyn juga memberikan semacam rambu-rambu untuk membuktikan bahwa telah terjadi kondisi ‘*digital divide*’ dalam penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dengan merumuskan sejumlah pertanyaan seperti: apa sajakah tipe teknologi yang diakses oleh masyarakat di rumah, di tempat kerjanya, dan di masyarakat terhadap teknologi yang mereka gunakan di rumah, ditempat kerjanya, dan dalam konteks komunitas seperti apa? Apa sajakah akses praktis yang efektif yang dilakukan oleh masyarakat terhadap teknologi yang mereka gunakan di rumah, di tempat kerjanya, dan dimasyarakat sendiri? Apakah maksud dan tujuan penggunaan teknologi yang menjadi fasilitas akses yang digunakan? Dalam kondisi apa keterlibatan penggunaan teknologi terjadi? Apa sajakah tipe-tipe modal sosial, ekonomi, kultural dan teknologi yang bisa digunakan oleh masyarakat ketika menggunakan teknologi? Apakah hasil jangka pendek dari keterlibatan dengan teknologi dari keterlibatan individu di masyarakat? Bagaimana akses masyarakat, keterlibatan dan hasil yang terjadi pada individu yang berbeda gender, usia, kelas, etnisitas, dan kemampuannya? Apa sajakah faktor-faktor mitigasi dan lingkungan yang dapat diidentifikasi mempunyai dampak pada perbedaan kelompok sosial dan motivasi mereka terlibat dengan TIK?

Dari pertanyaan-pertanyaan di atas, bisa diketahui bagaimana perbedaan akses teknologi komunikasi dan informasi yang ada di masyarakat. Jika hasilnya memperlihatkan perbedaan atau kesenjangan maka bisa dikatakan bahwa *digital divide* memang terjadi. Konsep '*digital divide*' sendiri awalnya dirumuskan oleh negara maju di dunia terhadap perbedaan atau kesenjangan pembangunan teknologi antara negara yang sudah berkembang dan negara yang sedang berkembang. Kesenjangan ini terjadi karena pada negara-negara maju, pembangunan teknologi komunikasi dan informasi terjadi begitu pesat mengikuti laju perkembangan industrialisasi sedangkan di negara-negara berkembang, kondisi ekonomi dan sosial mereka tidak mampu menopang kemajuan perkembangan teknologi yang terjadi seperti di negara-negara maju. Itulah sebabnya, Castell (1996) mengatakan bahwa kemajuan pembangunan teknologi komunikasi dan informasi menjadi salah satu faktor penting dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat, termasuk pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial. Sebagai konsekuensi dari kemajuan teknologi yang tidak sama antara negara maju dan sedang berkembang, maka perolehan informasi atau akumulasi kekayaan informasi pun hanya mampu dimiliki oleh negara-negara maju.

Konsep *digital divide* diadopsi negara-negara berkembang untuk membedakan kesenjangan pembangunan antara masyarakat urban dengan masyarakat yang berada di *remote area* (Noris 2001). Masyarakat urban telah merasakan dampak pembangunan infrastruktur teknologi komunikasi dan informasi, tentu mudah mendapatkan akses penggunaannya, sehingga mampu mengikuti kedatangan teknologi komputer terbaru (*the latest edition*), serta layanan jaringan telepon yang jauh lebih baik dibandingkan dengan masyarakat *remote area*. Kesenjangan semakin besar karena pemerintah sendiri tidak mampu melakukan pemerataan pembangunan dan hasilnya.

Memahami persoalan tersebut, pemerintah Indonesia melakukan percepatan pembangunan dengan merangkul swasta penyedia jasa layanan telekomunikasi. Pemerintah pun mencanangkan program USO sebagai salah satu inisiatif pembangunan TIK di daerah-daerah terpencil. Dengan USO diharapkan semakin banyak rakyat terlayani TIK. Tahun 2010 pemerintah membangun infrastruktur jaringan internet yang bisa menjangkau khalayak pelosok-pelosok Indonesia. Problem terbesar yang dihadapi Indonesia adalah masih tertinggalnya daerah-daerah pelosok untuk mengikuti kemajuan perkembangan teknologi. Kendala ini merupakan salah satu aspek signifikan yang mempengaruhi tidak meratanya penyebaran informasi dan hasil-hasil pembangunan di tanah air ke seluruh bagian Indonesia. Hal ini mengakibatkan pembangunan tidak bisa dirasakan oleh semua masyarakat Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Konsep USO atau *Universal Service Obligation* merupakan konsep yang berkembang atau tumbuh (Milne 1998, Mueller 1997, Nenova 2007). Gelombang deregulasi dalam bidang sarana prasarana selama tahun 1980-1990an telah merubah kebutuhan-kebutuhan intelektual di dunia secara masif dan kebutuhan kebijakan terhadap isu terkait pelayanan universal (Xia & Lu 2008). Pada permulaan abad ke-20, pelayanan universal diartikan sebagai akses peningkatan suara, menuju Jaringan Berganti Telepon Publik atau *Public Switched Telephone Network* (PSTN) (Backman 1995 dalam Xia & Lu 2008)

USO salah satunya diwujudkan dalam bentuk konsep desa berdering, yaitu desa yang diakses oleh telekomunikasi. Ada pula desa pintar, atau desa punya internet, maksudnya dengan adanya fasilitas internet, masyarakat dapat mengenal dan menggunakan internet untuk mendapatkan informasi. Jenis program ini dikenal dengan Pusat Layanan Internet Kecamatan (PLIK) dan Mobile Pusat Layanan Internet Kecamatan (M-PLIK). Program ini merupakan perwujudan dari visi *Information and Technology* (ICT) yaitu terwujudnya masyarakat Indonesia berbasis informasi secara bertahap hingga tahun 2025. Tujuannya untuk memberikan akses internet secara mudah dan murah kepada masyarakat di pedesaan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Dalam penelitian kuantitatif, peneliti melihat secara deskriptif profil pengguna layanan USO dalam program PLIK dan MPLIK di wilayah Jawa Timur, dan akses-akses apa saja yang digunakan oleh para pengguna yang berada di daerah rural, beserta respon masyarakatnya.

Penelitian dilakukan di Kabupaten Lumajang dan Banyuwangi, Jawa Timur dengan mengambil 2 kecamatan di masing-masing Kabupaten. Kedua daerah itu dipilih sebagai daerah percontohan program PLIK dan MPLIK desa desa terpencil di Jawa Timur. Di Kabupaten Lumajang, kecamatan yang dijadikan sebagai wilayah penelitian adalah Senduro dan Pasrujambe sedangkan di Kabupaten Banyuwangi, kecamatan yang diambil adalah kecamatan Srono dan Muncar.

Populasi dalam penelitian merupakan individu yang ada di wilayah desa-desa yang dipilih secara purposive, yakni mereka yang pernah dan sedang menggunakan layanan PLIK dan MPLIK. Pertimbangannya karena tidak semua lapisan masyarakat atau individu yang ada di desa-desa percontohan program PLIK dan MPLIK telah memanfaatkan program ini. Untuk kepentingan studi lapangan, setidaknya ada 3 (tiga) jenis instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu (i) daftar pertanyaan (kuesioner); (ii) pedoman wawancara mendalam, dan (iii) dokumentasi data sekunder yang diperoleh dari data desa maupun dari pemerintah. Selanjutnya masing-masing responden diwawancara dengan kuesioner terstruktur yang disiapkan, dan juga wawancara mendalam terhadap tokoh-tokoh kunci atau informan yang bisa memberikan penjelasan tentang pelaksanaan program ini.

Analisis data kuantitatif menggunakan metode statistik (SPSS) yang disesuaikan dengan tujuan penelitian dan karakteristik data. Sedangkan, untuk data kualitatif digunakan analisis deskripsi naratif agar mampu menjelaskan lebih detail fenomena-fenomena yang terjadi.

Hasil penelitian dan Pembahasan

Pengguna aktual PLIK dan MPLIK di Jawa Timur

Gambaran umum responden, meski secara singkat, dipandang perlu dikemukakan agar dapat mengetahui bagaimana kondisi latar sosial demografis responden sebagai setting sosial budaya masyarakat, terutama dalam merespon program KPU/USO, yaitu kehadiran PLIK dan MPLIK di desanya. Latar belakang responden yang dimaksud di sini adalah juga untuk melihat pengguna aktual kehadiran internet desa dari golongan usia dan jenis kelamin. Data responden dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Usia responden

Usia responden	Jumlah	Persentase
15 – 24 tahun	70	35 %
25 – 34 tahun	60	30 %
35 – 44 tahun	40	20 %
45 – 54 tahun	20	10 %
55 – 64 tahun	10	5 %
Total	200	100 %

Tabel 1 memperlihatkan pengguna internet desa memang masih didominasi oleh anak-anak usia sekolah yakni SMP dan SMU serta setingkat universitas. Sebanyak 70 orang atau 35% mereka berusia antara 15-24 tahun, dan 30% mereka yang berusia antara 25-35 tahun. Responden usia produktif inilah yang mahir dan terbiasa dengan penggunaan perangkat teknologi komunikasi informasi yang sudah canggih. Merekalah pengguna terbesar internet yang saat ini sudah masuk ke

pelosok di pedesaan. Responden ini juga adalah kelompok masyarakat yang mempunyai mobilitas tinggi dan akses dengan dunia di luar desanya lebih besar dibandingkan dengan kelompok usia yang lebih dewasa di atasnya.

Tabel 2 menunjukkan bahwa stereotip pengguna teknologi adalah laki-laki agaknya terbukti dari hasil penelitian ini. Jumlah pengakses internet desa di dua Kecamatan yang diteliti adalah laki-laki sebanyak 150 orang atau 75% dari jumlah responden yang teliti. Hal ini menunjukkan bahwa laki-laki lebih dekat dan menguasai penggunaan teknologi komunikasi dan informasi dibandingkan kaum perempuan. Kesenjangan akses internet antara jenis kelamin yang berbeda ini menunjukkan bahwa literasi internet pada kedua jenis kelamin ini juga berbeda. Selain itu anggapan bahwa teknologi identik dengan laki-laki agaknya juga dipahami sama oleh kaum perempuan.

Tabel 2
Jenis kelamin responden

Jenis kelamin responden	Jumlah	Persentase
Perempuan	50	25%
Laki-laki	150	75%
Total	200	100%

Akses internet desa ini berada di ruang publik terbuka sehingga untuk berkumpul atau *nongkrong* berlama-lama di warnet memang kebanyakan dilakukan oleh laki-laki dibandingkan kaum perempuan yang *enggan* atau terkonstruksi oleh budaya untuk lebih baik tinggal di rumah daripada *nongkrong internetan* di warnet-warnet terbuka. *Digital divide* tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang tinggal di urban dan rural, tetapi juga terjadi pada kelompok jenis kelamin laki-laki dan perempuan, di mana akses perempuan terhadap internet kecil jumlahnya dibandingkan laki-laki.

Akses dan perilaku komunikasi

Akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi merupakan tuntutan kebutuhan masyarakat modern saat ini. Selain sebagai indikator meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya informasi dan komunikasi, adanya akses terhadap informasi dan komunikasi menjadi salah satu indikator tingkat kesejahteraan masyarakat. Beberapa indikator akses rumah tangga terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang dikemukakan di dalam penelitian ini meliputi kepemilikan telepon seluler sebagaimana dideskripsikan sebelumnya, kepemilikan komputer, dan berbagai fasilitas TIK lainnya yang dimiliki responden.

Kemudahan akses komunikasi antara lain ditandai dengan ketersediaan (dan jumlah kepemilikan) alat komunikasi seperti telepon seluler. Tingkat kepemilikan alat komunikasi dapat menunjukkan bahwa dalam suatu masyarakat sudah mengikuti perkembangan arus informasi dan komunikasi.

Tabel 3
Kepemilikan alat-alat komunikasi

Memiliki alat komunikasi	Ya	Tidak	Jumlah
Komputer	128 (64%)	72 (36%)	200
Telepon	140 (70%)	60 (30%)	200
FWA	16 (8%)	184 (92%)	200
HP/Mobile Phone	196 (98%)	4 (2%)	200
Laptop	0	0	200

Data pada Tabel 3 menunjukkan kepemilikan alat komunikasi yang banyak dimiliki oleh masyarakat pedesaan saat ini adalah *handphone* atau *mobile phone*. Telepon genggam bukan lagi menjadi barang asing dan mewah bagi masyarakat di Indonesia saat ini. Keberadaan telepon genggam bisa ditemui di mana saja. Kondisi ini berbeda dalam 10 tahun yang lalu, di mana telepon genggam masih menjadi alat komunikasi yang dianggap mahal dan barang mewah. Kepemilikan telepon genggam masyarakat di kecamatan yang diteliti juga menunjukkan angka 98%, artinya dari 200 orang responden 196 orang menyatakan mempunyai telepon genggam.

Pada 200 orang responden yang menyatakan memiliki computer, terdapat sebanyak 126 orang atau 64% dan yang memiliki FWA sebanyak 16 orang atau 8% saja. Tidak ada satupun dari 200 orang responden yang memiliki laptop. Hal ini karena laptop dianggap sebagai alat komunikasi yang masih mahal dan masih sulit dipergunakan karena derajat literasi teknologi dan penggunaannya sendiri sebagai komputer pribadi yang bisa dipakai *mobile* dirasa masih belum diperlukan segera.

Pengetahuan tentang desa pintar

Perkembangan teknologi komunikasi informasi memiliki implikasi dalam perilaku berkomunikasi masyarakat. Jika sebelumnya masyarakat membutuhkan waktu lama untuk menyampaikan informasi, maka sekarang hanya butuh beberapa menit, bahkan detik saja untuk menyampaikan informasi, yakni dengan cara berkomunikasi dengan telepon genggam. Hal yang sama di hadapi oleh masyarakat di zaman ini adalah mendapatkan informasi semakin mudah dan cepat diperoleh dengan menggunakan internet untuk mengetahui berbagai macam informasi terkait *current affairs*, mulai kehidupan politik, sosial, budaya, hingga agama. Meskipun begitu, tidak semua masyarakat bisa menikmati perkembangan tersebut karena keterbatasan infrastruktur komunikasi. Oleh karena itu menjadi wajar jika masih terdapat kesenjangan informasi di Indonesia.

Jika merujuk pada hasil penelitian ini, maka program Desa Pintar sebagai bagian dari program KPU/USO telah direspon positif oleh masyarakat. Alasan yang muncul adalah karena program ini bukan hanya mengenalkan teknologi informasi, melainkan juga mengenalkan tradisi baru dalam berkomunikasi bagi masyarakat, bahkan juga budaya baru buat masyarakat untuk mendapatkan informasi. Program ini sudah banyak dikenal masyarakat, meskipun di beberapa daerah secara ekstrim belum pernah menggunakan bahkan tidak tahu tentang keberadaan program ini. Kondisi ini wajar karena program Desa Pintar hanya ada di pelosok desa yang jauh dari pusat keramaian.

Tabel 4
Pengetahuan masyarakat terhadap internet di desa

Pengetahuan responden	Jumlah	Persentase
Tahu	20	10%
Tidak Tahu	180	90%
Total	200	100%

Berdasarkan Tabel 4, terdapat hanya 10% saja masyarakat yang mengetahui adanya program pemerintah yang bernama Desa Pintar. Sebagian besar di antara mereka tidak tahu adanya program ini. Mereka tahu ada warnet-warnet di dekat tempat tinggal mereka, tapi yang mereka tahu warnet itu adalah milik swasta yang berbayar, bukan program yang disediakan internet murah untuk rakyat. Selain itu karena keberadaan sinyal yang lemah, juga menyebabkan lambatnya koneksi internet sehingga banyak ditinggalkan oleh pengguna. Terutama bagi wilayah-wilayah yang terkena *blankspot*.

Penggunaan PLIK dan MPLIK

Berbeda dengan pengetahuan masyarakat terhadap program desa pintar, masyarakat di kecamatan-kecamatan yang diteliti mengatakan bahwa mereka menggunakan layanan Program Layanan Internet Kecamatan (PLIK) di desa-desa tersebut. Kebanyakan yang mengatakan menggunakan adalah siswi-siswi SMP dan SMU serta mahasiswa yang kuliah. Mereka menggunakan untuk keperluan akses informasi untuk sekolah dan untuk kebutuhan sosial media mereka.

Tabel 5
Pengguna PLIK

Pengguna PLIK	Jumlah	Persentase
Pernah menggunakan	90	45%
Tidak pernah	110	55%
Total	200	100%

PLIK = Pusat Layanan Internet Kecamatan

Dalam hal penggunaan PLIK, tabel 5 menunjukkan sebanyak 90 orang dari 200 orang responden atau 45% mengatakan pernah menggunakan jasa layanan PLIK. Mereka mengaku bahwa keberadaan PLIK dekat dengan tempat tinggal dan ada yang dekat dengan sekolah mereka. Selain itu seringkali menggunakan PLIK karena tugas-tugas sekolah yang menuntut mereka untuk mencari informasi dari internet. Sedangkan yang mengaku tidak menggunakan internet kebanyakan para pekerja, yakni petani dan ibu rumah tangga, serta orang dewasa yang merasa tidak mempunyai kebutuhan dengan internet.

Terlihat bahwa faktor kedekatan dengan lokasi mereka beraktifitas, kemudian faktor kebutuhan menggunakan layanan internet dan kenyamanan atas pelayanannya, telah menjadi faktor penentu PLIK diminati oleh penggunanya. Khususnya, kecenderungan pengguna PLIK berasal dari kalangan usia pelajar memperlihatkan bahwa mereka menjadi pengguna karena memiliki minat pada layanan PLIK.

Beberapa remaja yang ditemui di tempat pelayanan PLIK dan MPLIK di Lumajang dan Banyuwangi menyatakan bahwa mereka menggunakan internet juga untuk keperluan hiburan bersosialisasi. Misalnya untuk mengakses Facebook atau Twitter dan juga ada yang *browsing* untuk melihat gambar-gambar artis Korea favorit mereka. Banyak juga kaum remaja yang menggunakan internet untuk melihat film di Youtube.

Tabel 6
Penggunaan MPLIK

Pengguna MPLIK	Jumlah	Persentase
Pernah menggunakan	124	57%
Tidak pernah	66	43%
Total	200	100%

MPLIK=Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

Dibandingkan dengan penggunaan PLIK, masyarakat di dua Kabupaten yang diteliti juga mengaku banyak yang menggunakan MPLIK. Tabel 6 menunjukkan, sebanyak 124 orang atau 57% menyatakan pernah menggunakan MPLIK. Rata-rata dari mereka adalah para orang dewasa. Hal ini karena penyedia jasa MPLIK tidak hanya menyediakan jasa internet keliling tetapi juga menggunakan mobilnya untuk keperluan pembayaran listrik melalui online. Mobil MPLIK jadi

berperan ganda, sehingga banyak masyarakat yang menggunakan jasa layanan MPLIK ini daripada PLIK.

Banyak orang juga mengenal MPLIK karena daerah mereka sering dikunjungi oleh mobil keliling yang menawarkan jasa internet. MPLIK juga lebih populer karena mereka berkeliling dan mobil yang digunakan lebih kelihatan dan menarik minat masyarakat untuk mendatanginya sehingga mereka ingin mencoba dan ingin tahu apa yang ada.

Keberadaan pembangunan TIK dan akses internet di desa-desa terpencil selama ini masih dalam taraf pengenalan. Masyarakat belum populer dengan penggunaan internet di desanya. Terlebih kehadiran media massa seperti televisi lebih dekat dan lebih mudah diakses dibandingkan dengan internet. Derajat literasi internet masih rendah. Oleh karena itu, intensitas masyarakat terutama usia dewasa terhadap internet jauh berbeda dengan siswi-siswi SMP dan SMU yang memang sudah terbiasa dengan teknologi ini.

Selama ini layanan PLIK di kecamatan menerapkan harga seperti yang dipatok pemerintah sebesar Rp 1000,- untuk 1 jam penggunaan. Harga ini dinilai relatif murah bagi masyarakat pengguna internet di pedesaan. Bahkan digunakan berdua dengan temannya mereka membayarnya secara patungan sehingga lebih murah lagi. Persentase terbesar pengguna internet murah di kecamatan untuk PLIK ini adalah antara Rp 1000 - Rp 3000 mereka tidak menggunakan untuk *browsing*, namun sekedar *update* status FB. Paling maksimal pengguna internet PLIK membayar Rp 6000 selama di depan komputer (Tabel 7).

Tabel 7
Biaya penggunaan PLIK

Biaya yang dipakai	Jumlah	Persentase
Rp 1000-Rp 3000	76	85%
Rp 4000-Rp 6000	14	15%
Rp 7000-Rp 9000	0	0
Rp 9000	0	0
Total	90	100%

PLIK = Pusat Layanan Internet Kecamatan

Hal ini tidak jauh berbeda dengan para *user* atau pengguna MPLIK. Rata-rata biaya yang dikeluarkan oleh 60% responden sebanyak Rp 1000-Rp 3000 sekali mengakses internet. Berikut data yang bisa dilihat dari hasil survei kepada responden pengguna MPLIK (Tabel 8).

Tabel 8
Biaya penggunaan MPLIK

Biaya yang dipakai	Jumlah	Persentase
Rp 1000-Rp 3000	86	60%
Rp 4000-Rp 6000	24	20%
Rp 7000-Rp 9000	12	10%
Rp 9000	12	10%
Total	124	100%

MPLIK=Mobil Pusat Layanan Internet Kecamatan

Tarif akses internet melalui MPLIK juga dinilai responden sangat terjangkau bahkan dapat dikatakan sangat murah. Bahkan untuk area pedesaan seringkali tidak dibebankan biaya bagi

pengguna. Menurut penuturan operator, hal ini juga menjadi bagian dari pelayanan kepada masyarakat yang kurang mampu agar mereka tetap mendapatkan kesempatan akses komunikasi dan informasi. Besar dana yang dikeluarkan pengguna sangat beragam namun mayoritas responden di semua provinsi hanya mengeluarkan dana Rp 1000 - Rp 3000.

Para pengelola MPLIK memang mengeluhkan rendahnya tarif yang diberlakukan oleh pemerintah, di mana untuk pembelian bensin saja tidak cukup. Apalagi daerah yang harus dijangkau MPLIK hingga ke pelosok yang jauh dari kota. Oleh karena itu untuk menutup biaya operasional, pengelola MPLIK menggunakan jasa tambahan untuk pembayaran listrik *online*. Bahkan beberapa MPLIK ditempel stiker PLN agar masyarakat tahu bahwa MPLIK seolah menjadi mobil PLN berjalan.

Ragam pemanfaatan PLIK dan MPLIK

Manfaat penggunaan internet di kecamatan-kecamatan bagi sebagian besar masyarakat pengguna internet mampu merubah pemahaman dan pengetahuan mereka tentang banyak hal. Berdasarkan data terlihat bahwa masyarakat merasakan manfaat dari keberadaan internet di desanya. Mereka tidak saja lebih terhubung dengan dunia luar, melainkan juga lebih mendapatkan manfaat yang optimal bagi peningkatan kemampuan diri dan kualitas hidupnya. Walaupun untuk peningkatan ekonomi misalnya, masyarakat belum merasakan manfaat maksimal. Dari hasil studi kualitatif ditemukan beberapa aspek pemanfaatan PLIK

PLIK dan MPLIK untuk peningkatan pengetahuan

Ketersediaan infrastruktur pembangunan PLIK ini pada dasarnya memberikan manfaat dalam rangka memajukan desa menjadi daerah yang maju dalam hal akses informasi dan komunikasi. Desa informasi ini dinilai masyarakat menjadi sarana edukasi untuk meninggalkan ketertinggalan. Respon masyarakat terhadap program PLIK positif seperti yang disampaikan oleh pengelola dan pengguna sebagai berikut:

“Selama ini, program layanan PLIK mendapat sambutan positif dari warga sekitar desa ini. Apalagi anak-anak dan para pelajar, mereka sangat antusias. Karena di desa ini selama ini tidak ada internet. Warga masyarakat kalau mau ngenet harus pergi keluar desa yang jaraknya cukup jauh” (Rahmat/pengelola PLIK) “Semenjak ada PLIK kami terbantuan terutama anak didik bisa akses informasi dan pengetahuan yang tidak didapat dari internet. Para pengajar juga demikian dalam mencari sumber referensi bahan ajar sekarang bisa lewat internet” (Abdul Mufid/Pengelola PLIK)

Pelaksanaan MPLIK juga memiliki beberapa pencapaian seperti yang diceritakan oleh pengguna-pengguna inspiratif di antaranya bermanfaat dalam menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat. Selain berguna bagi siswa dan guru, MPLIK juga dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat dalam upaya meningkatkan pengetahuan dan keterampilan.

PLIK dan MPLIK sebagai media pengembangan desa

Program PLIK telah menjadi sarana pengembangan desa melalui pembuatan Blog desa. Namun tidak semua desa mampu memanfaatkan hal ini. Di kecamatan-kecamatan yang dijadikan objek penelitian ini, blog kecamatan memang mulai digarap. Ini dikarenakan setiap kecamatan ditempatkan pegawai dari infokom daerah yakni petugas informasi yang bertanggung jawab untuk mengelola blog atau website kecamatan. Sehingga dengan adanya program PLIK ini semakin terbantuan.

Selanjutnya, pemanfaatan PLIK oleh aparat desa untuk mengetik dan mengirim data kegiatan desa yang seringkali diminta secara *online* melalui email. Pengelola PLIK juga membantu mencari informasi pertanian untuk Gabungan Kelompok Tani. Hal ini diungkapkan oleh responden sebagai berikut :

“Untuk kelompok tani, khususnya yang tergabung dalam kelompok tani gabungan, keberadaan PLIK ini sangat membantu bagi para petani untuk mencari informasi masalah pertanian seperti harga pertanian dsb. Ketika para petani ingin informasi tentang pertanian bisa tanya ke pengelola atau buka sendiri. (Agus/Kepala Gopoktan)

PLIK dan MPLIK untuk media sosial dan muda mudi

Peneliti juga menemukan bahwa mayoritas pengguna PLIK dan MPLIK di semua daerah adalah anak-anak, yang menggunakannya untuk mengakses *game*, media sosial atau untuk kegiatan hiburan.

Di samping bagi remaja putra yang seringkali sebelumnya menghabiskan malam secara *negative* (mabuk-mabukan) telah beralih kepada akses internet. Meskipun jaringan yang diakses mayoritas adalah facebook, menurut pak Mamat, ini telah mengurangi keresahan masyarakat terhadap kenakalan remaja di daerahnya.

“..biasanya mereka (anak muda) nongkrong didepan jalan raya ini..didepan gardu...mabuk-mabukan...tapi semenjak ada PLIK dan MPLIK jadi berkurang, malah sudah gak ada lagi anak-anak yang mabuk-mabukan...larinya ke internet, kana da permainan, chatting, facebookan, jadi masyarakat tenang juga gak takut lagi” (Mamat/warga pengguna PLIK dan MPLIK)

“Program yang paling banyak digunakan oleh pengguna adalah jejaring sosial, seperti Facebook, game school, dan Google.” (Agung)

PLIK dan M-PLIK untuk media pembelajaran TIK

PLIK juga berfungsi sebagai laboratorium komputer bagi sekolah-sekolah yang masih mempunyai perangkat komputer yang jelek. Guru sekolah seringkali memberikan tugas kepada siswanya untuk mencari informasi sekalian untuk belajar mengetik dengan komputer. Sehingga keberadaan PLIK membantu mendukung proses belajar dengan inovasi baru teknologi komputer ini. Salah seorang pengelola PLIK menjelaskan, *“anak-anak sekolah suka dapat tugas mengetik ya dikerjakan disini”*.

Pengembangan pemanfaatan MPLIK juga dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan Dinas Pendidikan dan PKK Kabupaten dalam penyelenggaraan pelantikan TIK bagi siswa sekolah. Hal ini terjadi di MPLIK Jawa Timur. Pengelola MPLIK bahkan membuka kursus kilat penggunaan komputer. MPLIK juga memiliki jadwal untuk mendatangi sekolah-sekolah sehingga dapat digunakan sebagai tempat berlatih TIK yang menjadi salah satu mata pelajaran atau ekstrakurikuler di sekolah.

Penempatan PLIK dan MPLIK yang berada di salah satu pondok pesantren juga dipakai untuk kegiatan sejenis. PLIK dan MPLIK digunakan sebagai laboratorium komputer oleh para anak didik pondok. Internet ini sangat membantu anak didik dalam mengakses sumber pengetahuan dan informasi yang selama ini tidak didapatkan di bangku sekolah. Bahkan juga sangat membantu para guru yang mengajar, untuk mencari literatur dan bahan ajar. Akan tetapi frekuensi penggunaan yang cukup tinggi di kalangan anak-anak juga sempat menimbulkan keresahan orang tua, terkait

dengan waktu beribadah. Oleh karena itu telah menjadi kesepakatan warga bahwa PLIK dan MPLIK tutup sementara saat waktu beribadah.

PLIK dan MPLIK untuk peningkatan ekonomi

Selanjutnya selain pengembangan ekonomis PLIK telah memfasilitasi pengembangan wirausaha sendiri melalui internet marketing. Kegiatan ini mengindikasikan, PLIK memiliki manfaat sebagai fasilitas untuk meningkatkan perekonomian meskipun masih dalam skala kecil.

Keberadaan PLIK dan MPLIK telah menarik perhatian masyarakat, terutama MPLIK menjadi media promosi kegiatan. MPLIK diyakini dapat menarik masa untuk berkumpul di suatu tempat. Pemanfaatan tersebut dapat menguntungkan berbagai pihak, mulai dari penyelenggara *event* yang mendapatkan keramaian, mobil MPLIK yang mendapatkan pengguna jumlah banyak, dan bagi pengguna yang dapat mengakses internet sambil menikmati kegiatan yang sedang diselenggarakan.

Pemanfaatan MPLIK sebagai media promosi ternyata tidak hanya sebatas pada promosi kegiatan, tetapi juga promosi sekolah atau yayasan. Pengelola MPLIK ada juga yayasan sekolah atau pondok pesantren. Fasilitas MPLIK sebagai mobil penyedia internet yang dikelola oleh yayasan sekolah telah menganggap MPLIK sebagai bagian dari fasilitas sekolah untuk siswa, bukan untuk masyarakat umum. MPLIK juga telah memotivasi pengelola dari pihak sekolah untuk menggunakannya sebagai media promosi ketika pembukaan penerimaan murid baru, MPLIK dimanfaatkan dalam *roadshow* promosi sekolah.

Pemanfaatan penggunaan PLIK dan MPLIK untuk keperluan pemasaran produksi telah memunculkan kreativitas, walau masih dilakukan dengan konsep marketing yang sederhana. Ada pondok pesantren memasarkan ternak kurban dan *aqiqoh* lewat internet. Pembelinya tidak hanya dari Indonesia tapi juga dari luar negeri seperti Malaysia, Singapura dan negara berpenduduk muslim lainnya. Mereka membeli hewan kurban sekaligus mempercayakan penyembelihan dan pembagian dagingnya. Hanya foto foto bukti yang nanti dikirimkan lewat internet pada para pembeli. Cara-cara mereka memasarkan ini masih menggunakan media sosial seperti facebook dan twitter. Sementara website resmi untuk berjualan belum digarap secara maksimal.

PLIK dan MPLIK sebagai persewaan internet hingga pembayaran online

Sisi pemanfaatan PLIK lainnya khususnya untuk wilayah Jawa Timur adalah pemanfaatan PLIK sebagai usaha warnet. Beberapa warga masyarakat di desa-desa menjadi penyedia jasa PLIK dengan membuka warnet-warnet berbayar. Namun mereka banyak yang tidak mencantumkan papan dari Kominfo tentang internet murah, sehingga banyak konsumen yang tidak tahu bahwa itu program internet pemerintah.

“...kalau dulu 2 bulan awal hanya 20 ribu perhari sekarang setelah ada penambahan perangkat dan speedy, pendapatan naik minimal 50 ribu sampai 100 ribu perhari lebih efektif ya” (Moh. Yasin/Pengelola PLIK Lumajang)

Berdasarkan pernyataan tersebut PLIK dimanfaatkan sebagai usaha warnet karena mitra harus membayar sejumlah uang untuk memperoleh layanan tersebut. Beberapa daerah memberlakukan tarif Rp 2500, tetapi ada juga yang harus menurunkan hingga Rp 1500 karena persaingan dengan warnet yang telah lebih dulu ada.

Upaya pemanfaatan secara positif tampak dari pemanfaatan sebagai laboratorium komputer, dan pengembangan kemampuan IT secara akademis dan *skill* yang diterapkan kepada Ponpes Nurul Ilmi melalui pelatihan *online* marketing, tampak bahwa salah satu aktor yang mampu

menggerakkan program PLIK dalam pemberdayaan masyarakat adalah pengelola itu sendiri. Selain itu dukungan aparat daerah setempat dalam skala terkecil mulai dari aparat desa dan aparat kecamatan juga diperlukan guna pemanfaatan program secara terpadu dan memperhatikan kebutuhan masyarakat setempat.

Salah satu fungsi kreatif pemanfaatan MPLIK adalah sebagai media pembayaran *online*. Hal ini dilakukan untuk menambah penghasilan pengelola MPLIK sekaligus memudahkan masyarakat. Masyarakat bahkan lebih mengenal MPLIK sebagai mobil tempat pembayaran *online*.

“Mobil pelayanan semacam itu (MPLIK) seringkali kita lihat di jalan-jalan namun dikenal sebagai tempat pembayaran listrik PDAM dan Telkom dan bukan sebagai tempat pelayanan internet murah”(Singgih, tokoh masyarakat)

Keberadaan PLIK dan MPLIK telah memberikan manfaat bagi masyarakat yang berada di lokasi penelitian. Manfaat terbesar yang dirasakan masyarakat adalah mendapatkan peningkatan pengetahuan. Tetapi terdapat perbedaan pada pernyataan manfaat terbesar berikutnya. MPLIK bermanfaat dalam mengembangkan desa dirasakan dan berguna dalam peningkatan kualitas hubungan sosial. Manfaat MPLIK untuk peningkatan perekonomian juga dirasakan oleh sebagian masyarakat.

Simpulan

Simpulan dari penelitian ini bahwa masih terjadinya *digital divide* pada masyarakat pengguna TIK di Jawa Timur di mana pengguna laki-laki masih mendominasi dibandingkan dengan pengguna perempuan. Selain itu usia pengguna internet dan inovasi program PLIK dan MPLIK ini adalah anak usia sekolah yakni 15 hingga 24 tahun. Harus diakui bahwa teknologi komunikasi sudah masuk di desa-desa. Sebagian besar masyarakat bahkan 98% masyarakat desa telah memiliki akses terhadap telepon seluler. Namun tidak semua masyarakat desa mengakses internet. Mereka yang terbiasa dengan yang memanfaatkan layanan ini terutama adalah anak sekolah, santri di pondok pesantren dan remaja usia kuliah. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan PLIK dan MPLIK 100% diakses oleh masyarakat tetapi hanya sebagian saja yang mengakses.

Program PLIK dan MPLIK telah membuka akses informasi dan komunikasi masyarakat semakin terbuka, mudah dan murah. Namun pemanfaatan masyarakat terhadap fasilitas teknologi komunikasi ini masih belum maksimal, karena minimnya pengetahuan masyarakat khususnya mengenai jaringan internet. Kondisi ini membuat kebijakan pemerintah tentang PLIK dan MPLIK masih pada tataran “pengadaan” belum sampai pada tingkat pelayanan dan pemanfaatan sebagaimana diharapkan. Meskipun program PLIK dan MPLIK masih belum maksimal, namun program ini dalam banyak hal telah memberikan sejumlah manfaat kepada masyarakat. Selain mempermudah akses komunikasi dan informasi, keberadaan program bagi sebagian masyarakat telah sangat membantu mencari informasi yang berkaitan dengan usaha ekonomi seperti mencari informasi pasar (marketing), meningkatkan jaringan bisnis, mengurangi biaya operasional, meningkatkan pendapatan usaha dan mencari informasi tentang peluang-peluang pengembangan usaha yang lain. Ada kreativitas yang muncul dalam penggunaan internet di pedesaan. Selain itu, program ini, juga telah mengakselerasi layanan-layanan sosial lainnya seperti pendidikan.

Daftar Pustaka

D’Allesandro D & Dosa N (2001) Empowering children and families with information technology. *Archive of Pediatric & Adolescent Medicine* 155(10): 1131-6.

- Katz JR Rice & Aspden P (2001) The Internet 1995-2000: Access, civic involvement and social Interaction. *American Behavioural Scientist* 45(3): 405-19.
- Milne C (1998) Stages of universal service policy. *Telecommunications Policy* 22(9):775-780.
- Mueller M (1997) Telecommunication success in the age of e-commerce: toward a third-generation universal service policy. *Federal Communications Law Journal* 49(3): 655-673.
- Nenova MB (2007) The new concept of universal service in a digital networked communications environment. *I/S: Journal of Law and Policy for the Information Society* 3(1):117-146.
- Reich R (1991) *The work of nations: a blueprint for the future*. London: Simon & Schuster
- Selwyn N (2004) Reconsidering political and popular understandings of the digital divide. *Dalam New Media & Society*. Thousand Oak, CA and New Delhi: Sage Publication. Vol 6(3): 341-362.
- Xia J& Lu TJ (2008) Bridging the digital divide for rural communities: The case of China. *Journal Telecommunication Policy* No.32:686-696.